

MENYOAL PENGIRIMAN SDM KOMPETEN KE JEPANG

Suyoto Rais

Ketua Umum Indonesia Japan Business Network

Ketia Indonesia mengadakan pesta demokrasi 17 April 2019 yang lalu, di Jepang berlangsung acara penandatanganan memorandum of understanding (MOU) antara Menteri Tenaga Kerja Mongolia dan Menteri Kehakiman tuan rumah.

Kesepakatan kedua negara tersebut terkait pengiriman tenaga kerja kompeten dari Mongolia ke Jepang menggunakan jenis visa kerja yang baru dirilis bulan ini, yaitu visa *tokuteigino* (pekerja kompeten khusus).

Tamu pejabat Mongolia tersebut adalah wakil pemerintah kelima setelah dari Nepal, Myanmar, Filipina dan Kamboja.

Selanjutnya akan segera diikuti oleh Cina dan 3 negara mitra pemasok tenaga kerja lainnya, termasuk Indonesia.

Seperti kita ketahui, Jepang yang telah menjadi *aging country* mulai kekurangan tenaga kerja produktif.

Selama ini kekurangan itu dipenuhi dengan mengundang para pemegang dari negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Saat itu ada visa *kenshu* dengan masa 2 tahun yang dimulai pada 1993, kemudian direvisi menjadi *ginojisshu* pada tahun 2005 dengan masa tinggal maksimal 3 tahun.

Menurut JITCO/ Japan International Training Cooperation Organization, saat ini ada 285 ribu pemegang di Jepang yang didatangkan dari Vietnam 39%, Cina 35%, Filipina 10%, Indonesia 8% dan Thailand 3%.

Kabarnya terdapat perbaikan kondisi kerja dan kehidupan para pemegang dengan revisi dari *kenshu* ke *ginojisshu* ini.

Namun program tersebut juga masih menuai kritik dari dunia internasional karena meskipun magang, aktualnya fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pemegang bekerja di tempat-tempat yang orang Jepang sendiri jarang yang mau dan mampu.

Karena itu, sejak bulan ini visa pemagangan ini direvisi lagi menjadi *tokuteigino* dengan lama tinggal 5 tahun untuk tipe-1 (1-go) dan bisa diperpanjang lagi untuk yang lulus kualifikasi tipe-2 (2-go). Ini bukan visa pemagangan lagi, tetapi visa pekerja kompeten di bidang terkait.

Ada 14 bidang kompetensi yang diijinkan masuk ke Jepang melalui visa *tokuteigino* tersebut, yaitu perawat, tenaga restoran, konstruksi, pertanian, hotel, industri permesinan, industri elektronika, cleaning service, industri perkapalan, pekerjaan bandara, perikanan, pertanian, servis mobil dan industri makanan-minuman kemasan.

Pemegang visa kabarnya bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang lebih baik dari orang Jepang selevelnya.

Sayangnya berdasarkan data-data yang penulis dapatkan, dari 1,46 juta tenaga asing yang diperlukan Jepang beberapa tahun ke depan, dari perkiraan saat ini Indonesia hanya kebagian sekitar 41.000 orang. Sementara Cina 389.000 orang, Vietnam 317.000 orang, Filipina 164.000 orang, Brasil 127.000 orang, Nepal 82.000 orang dan sisanya dari Myanmar, Thai, Kamboja, Mongolia dan lain-lain.

Tentu ada banyak faktor yang membuat Jepang mempertimbangkan jumlah pekerja asing tersebut. Namun kemungkinan besar masalah itu masih bisa dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal ini merupakan tantangan yang berlu diatasi berkaitan dengan ujian kompetensi dan pemberian sertifikasi sebagai syarat untuk mendapatkan visa.

Dalam kaitan itu, Filipina sudah diijinkan menguji dan memberikan sertifikasi di negaranya. Dalam waktu dekat akan ditambah negara-negara yang telah menanda-tangani nota kesepahaman dengan Jepang.

Pemerintah Jepang sendiri menargetkan hingga Maret 2020 sudah bisa memindahkan uji kompetensi ini ke negara-negara mitra pemasok tenaga kerja. Memang realisasi dari program tersebut baru bisa dilakukan setelah ada penandatanganan kesepahaman antar kedua pemerintah, yang biasanya diwakili oleh kementerian tenaga kerja di masing-masing negara.

Agenda Pemerintah Jepang saat ini adalah agar masing-masing negara pemasok tenaga kerja tersebut bisa meminimalkan para *broker* tenaga kerja yang tidak memberikan nilai

tambah, meminimalkan jaringan penyaluran tenaga kerja yang membebani para pekerja dengan pungutan mahal, dan keinginan agar para negara pemasok bersungguh-sungguh mendidik dan menyeleksi para pekerja yang akan mendapat sertifikasi kompetensi.

Jepang juga meminta dibimbing tingkah-lakunya dan juga bisa berbahasa Jepang minimal level 4 (N4). Sejauh ini belum ada kuota masing-masing negara yang ditulis di nota kesepahaman dimaksud.

Kemungkinan, pada praktiknya hal itu akan lebih banyak tergantung kepada kesiapan dan juga pendekatan para pihak di kedua negara.

INTENSIFKAN NEGOSIASI

Dengan demikian jelas, bahwa Indonesia sebenarnya perlu meningkatkan negosiasi dan menunjukkan kesiapan untuk mendukung pengiriman tenaga kerja kompeten ini.

Indonesia sebenarnya punya sumber daya manusia (SDM) kompeten lebih dari cukup. Hal ini juga didukung dengan tersedianya lembaga pencetak SDM kompeten, termasuk para pembimbing dan penguji yang memadai.

Para pihak penerima di Jepang pun sudah menunggu kapan bisa segera mendapatkan tenaga kerja dari Indonesia sebanyak-banyaknya.

Pengiriman SDM kompeten ke Jepang ini bukan hanya akan menambah kesempatan bekerja warga negara Indonesia, tetapi juga bisa menambah diaspora asal negeri ini di Negeri Sakura. Mereka bisa berperan sebagai ujung tombak bagi promosi Indonesia di banyak hal.

Semoga Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dapat bertindak sebagai koordinator dari instansi-instansi terkait lainnya untuk segera bernegosiasi dengan Pemerintah Jepang.

Minimal agar Indonesia tidak kalah *start* lagi dengan negara-negara pemasok tenaga kerja lainnya.
